

PEDOMAN PENILAIAN PENYELENGGARAAN SPIP PADA K/L/D (RESULT-BASED SPIP)



AGENDA

GAMBARAN UMUM PENGENDALIAN INTERN

- MANDAT PEMBINAAN & PENYELENGGARAAN
- KETERKAITAN SPIP, MR, DAN KAPABILITAS APIP
- KONDISI EKSISTING

PEMBAHARUAN PEDOMAN PENILAIAN

- *DUE PROCESS*
- ARAH PEMBAHARUAN
- *FRAMEWORK* PEMBAHARUAN
- PERBANDINGAN SEBELUM & SESUDAH
- PENILAIAN MANDIRI
- PENJAMINAN KUALITAS

RISIKO & MITIGASI PENYUSUNAN & PENERAPAN PEDOMAN



GAMBARAN UMUM PENGENDALIAN INTERN

MANDAT PP 60 TAHUN 2008 TERKAIT PEMBINAAN SPIP



ASSESS AND ASSIST



MANDAT PP 60 TAHUN 2008 TERKAIT *GOVERNANCE RISK CONTROL (GRC)*

Pasal 1

SPI merupakan **proses integral** untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi

Pasal 11

Peran APIP:

- Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan dan 3E
- **Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas MR**
- Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan

Pasal 3

Penerapan unsur SPIP dilaksanakan **menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan** Instansi Pemerintah

Pasal 13

Pimpinan Instansi Pemerintah **wajib melakukan penilaian risiko** terhadap:

- Tujuan Instansi Pemerintah
- Tujuan tingkat kegiatan

Pasal 14

Untuk mencapai tujuan, organisasi perlu menetapkan:

- Strategi operasional
- **Strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko**



TERCAPAINYA TUJUAN ORGANISASI

Melalui:

- Kegiatan yang efektif dan efisien
- Keandalan pelaporan keuangan
- Pengamanan asset negara
- Ketaatan terhadap peraturan perundangan



KETERKAITAN SPIP, MANAJEMEN RISIKO, DAN KAPABILITAS APIP

SPIP

Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi

Kondisi Existing:

- Pengendalian belum diarahkan pada tujuan organisasi dan 4 tujuan SPIP
- Kegiatan pengendalian belum dikaitkan dengan hasil penilaian risiko

KAPABILITAS APIP

Kemampuan APIP untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan untuk mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi

Kondisi Existing:

- Kegiatan pengawasan belum dikaitkan dengan risiko organisasi
- Kompetensi SDM APIP belum memadai

MANAJEMEN RISIKO

Perpaduan antara budaya, sistem, dan proses untuk mengoordinasikan, mengidentifikasi, dan mengelola risiko, sebagai bagian dari penguatan penerapan SPIP dalam rangka mencapai tujuan organisasi

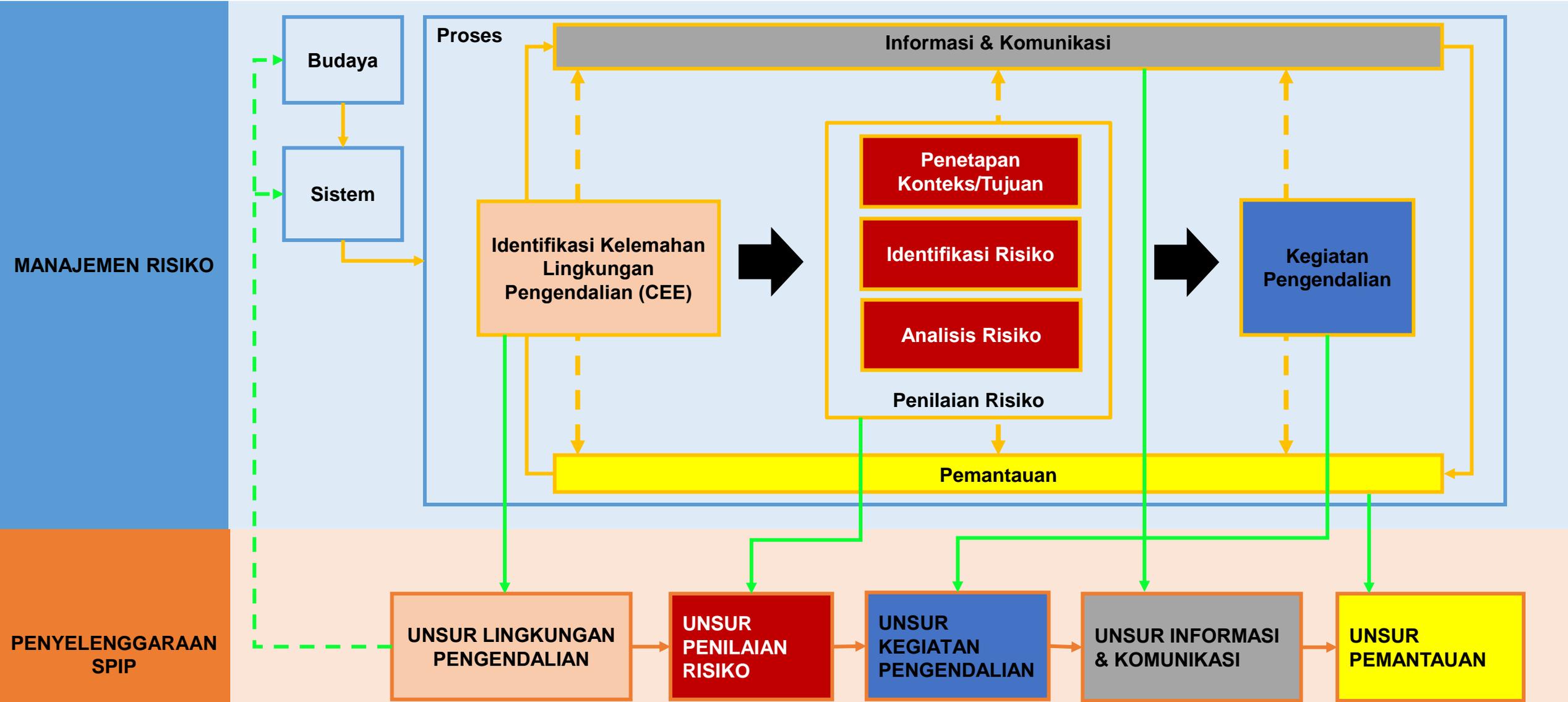
Kondisi Existing:

- Belum terdapat struktur pengelolaan risiko
- Belum sepenuhnya dikaitkan dengan tujuan organisasi
- Belum dikelola dan dipantau secara berkelanjutan

GOALS



POLA HUBUNGAN PENYELENGGARAAN SPIP DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO



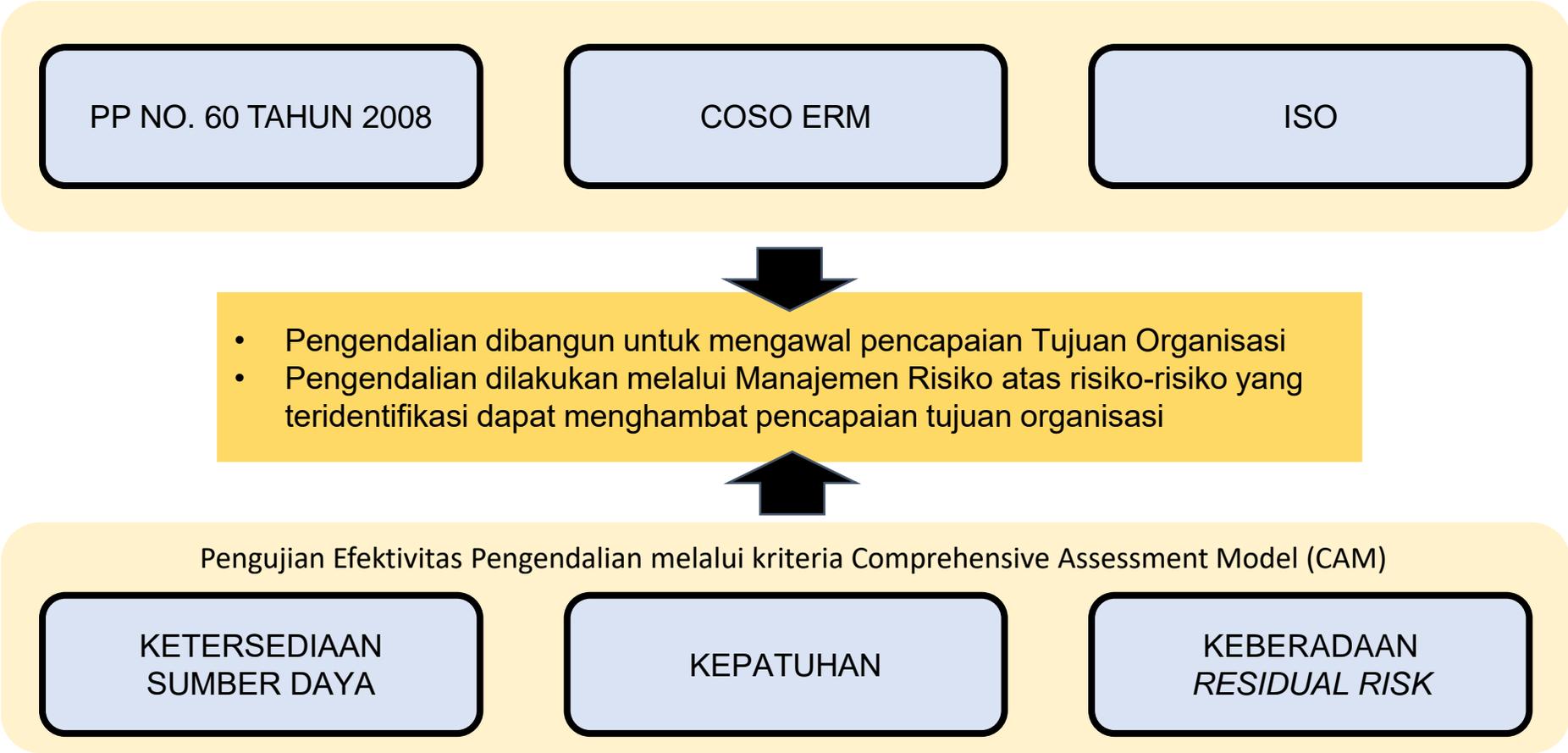
POLA HUBUNGAN PENYELENGGARAAN SPIP DAN PENINGKATAN KAPABILITAS APIP



KONDISI PENYELENGGARAAN DAN PENILAIAN SPIP, MANAJEMEN RISIKO, DAN PENGAWASAN APIP SAAT INI



LANDASAN TEORI





PEMBAHARUAN PEDOMAN PENILAIAN

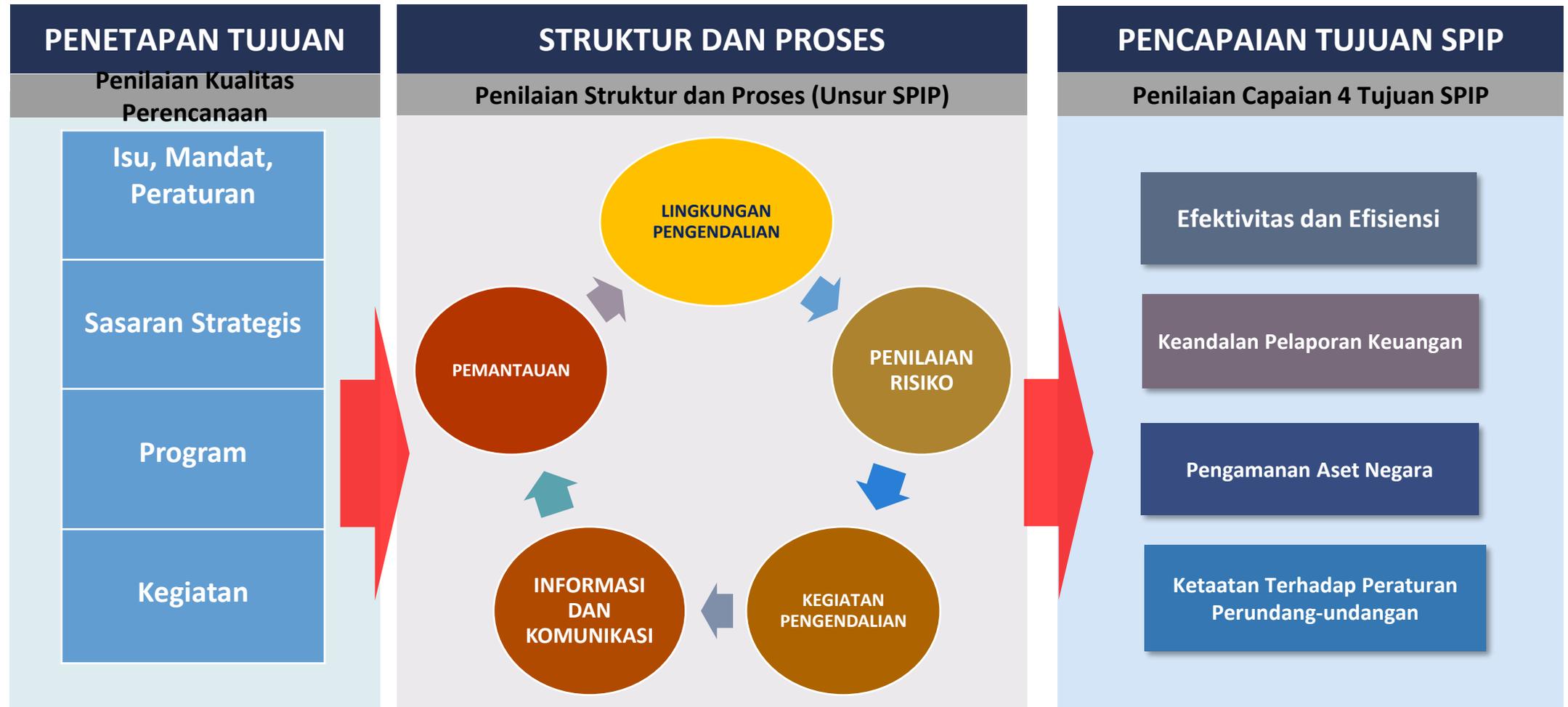
DUE PROCESS



ARAH PERKEMBANGAN PENILAIAN SPIP KE DEPAN



FRAMEWORK PENILAIAN PENYELENGGARAN **RESULT-BASED SPIP**



MANAJEMEN KUALITAS SEKTOR PUBLIK

PERBANDINGAN PENILAIAN SEBELUM DAN SESUDAH PEMBAHARUAN



SEBELUM

Objek Penilaian	Struktur dan proses
Kaitan dengan 4 Tujuan SPIP	Belum dikaitkan
Penentuan Satker Sampel	Berdasarkan keterwakilan fungsi
Penilaian Efektivitas Pengendalian	Belum diarahkan
Metodologi Penilaian	Terkesan <i>document based</i>
Pengintegrasian Penilaian	Hanya menilai unsur-unsur SPIP
Fokus Penilaian	Lebih kepada pemberian skor/level
Proses Penilaian	Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas tidak dalam satu proses



SESUDAH

Perencanaan, struktur dan proses, serta pencapaian hasil
Dikaitkan secara langsung
Berdasarkan keterwakilan fungsi, sasaran strategis, dan tujuan SPIP
Diarahkan
Mengedepankan <i>substance over form</i>
Mengintegrasikan penilaian SPIP dengan penilaian MRI, IEPK, dan kapabilitas APIP
Penentuan Aol dan pemberian rekomendasi perbaikan pengendalian
Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas menjadi satu proses

LEVEL MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP

- Tiap level didefinisikan dengan mempertimbangkan kondisi perencanaan, struktur dan proses, serta pencapaian hasil
- Tiap level didefinisikan dengan pendekatan SPIP, kapabilitas APiP, penyelenggaraan MR, dan pengendalian korupsi

LEVEL 1
RINTISAN

LEVEL 2
BERKEMBANG

LEVEL 3
TERDEFINISI

LEVEL 4
*TERKELOLA DAN
TERUKUR*

LEVEL 5
OPTIMUM



PROSES PENILAIAN

Melalui 2 tahapan:

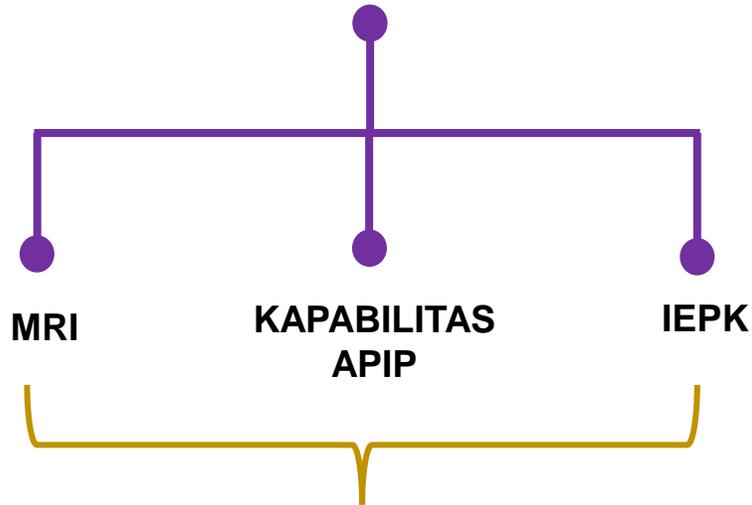
- A. Penilaian Mandiri (PM)
- B. Penjaminan Kualitas (PK)

PRINSIP PENILAIAN PENYELENGGARAAN SPIP

1

PARAMETER PENILAIAN
TERINTEGRASI

INTEGRASI PARAMETER PENILAIAN



DILEKATKAN PADA
SUBUNSUR-SUBUNSUR SPIP

2

KOLABORASI DALAM
PENILAIAN DAN
PENJAMINAN KUALITAS

K/L

- PM: APIP K/L
- PK: Deputi Pembina dan Deputi Investigasi

PEMDA

- PM: APIP Pemda
- PK: Perwakilan BPKP, Deputi PPKD, dan Deputi Investigasi

*PM: Penilaian Mandiri PK: Penjaminan Kualitas

3

PENILAIAN MENGHASILKAN
3 HASIL

OUTPUT

MRI

NILAI
MATURITAS
SPIP

IEPK

*MRI: Manajemen Risiko Indeks
IEPK: Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi



PENILAIAN MANDIRI

1. TAHAP PERSIAPAN

a. Pembentukan Tim Assessor



Min. 1/3 pernah mengikuti diklat/bimtek SPIP & penilaian SPIP dan/atau mengikuti penugasan terkait SPIP

Jumlah sebanding dengan unit kerja yang dinilai (maksimal 1 assessor menilai 4 satker)



Surat Tugas berdasarkan PKPT

Hari penugasan sebanding dengan unit kerja yang dinilai (minimal 30 hari kerja, 50% di kantor, 50% di lapangan)



b. Penentuan Satker Sampel

SATKER WAJIB

Pendukung keandalan pelaporan keuangan

Pendukung pengamanan aset

Pendukung ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

SATKER PILIHAN

Pendukung Efektivitas dan Efisiensi Tujuan

30% Sasaran Strategis (Minimal 2 Sasaran Strategis)

Satuan Kerja Terkait
Satker A
Satker B
Satker C

SATKER PENDUKUNG

Perencanaan

Pengelola SDM

Informasi dan Komunikasi

c. Pembentukan Tim Counterpart



Min. 1/3 pernah mengikuti diklat/bimtek SPIP dan/atau mengikuti penugasan terkait SPIP

Setiap satker sampel harus memiliki anggota tim counterpart (minimal 2 orang)



Penugasan berdasarkan Surat Tugas atau Surat Keputusan

Sebanding dengan hari penugasan Tim Assessor



d. Pemaparan Rencana Penilaian



Substansi Rencana Penilaian:

- Latar Belakang
- Tujuan dan Manfaat Penilaian
- Ruang Lingkup Penilaian
- Metodologi Penilaian
- Tahapan dan Jadwal Waktu Penilaian
- Sistematika Pelaporan
- Rencana Kebutuhan Sumber Daya
- Susunan Tim Penilaian

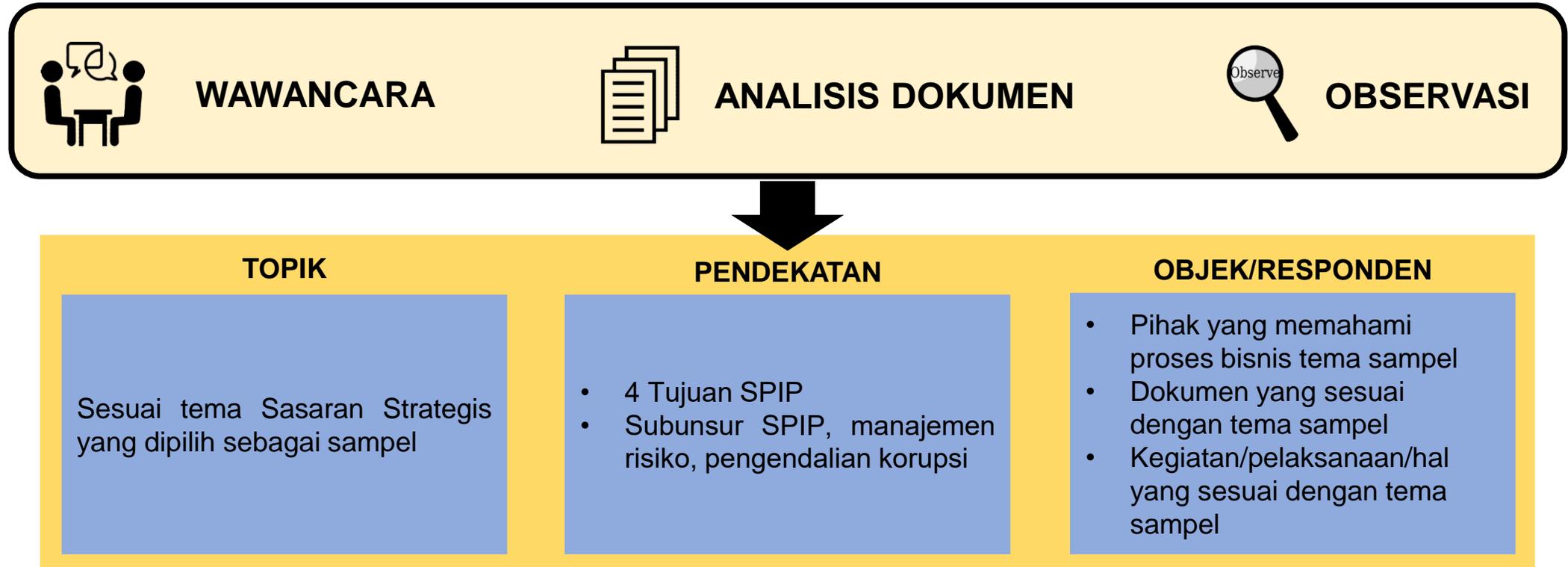


Tujuan Pemaparan:

- Mendapatkan kesepakatan pimpinan/pejabat kunci
- Memperoleh persamaan persepsi antara assessor dengan pimpinan/pejabat kunci

2. TAHAP PELAKSANAAN

TEKNIK PENGUMPULAN BUKTI

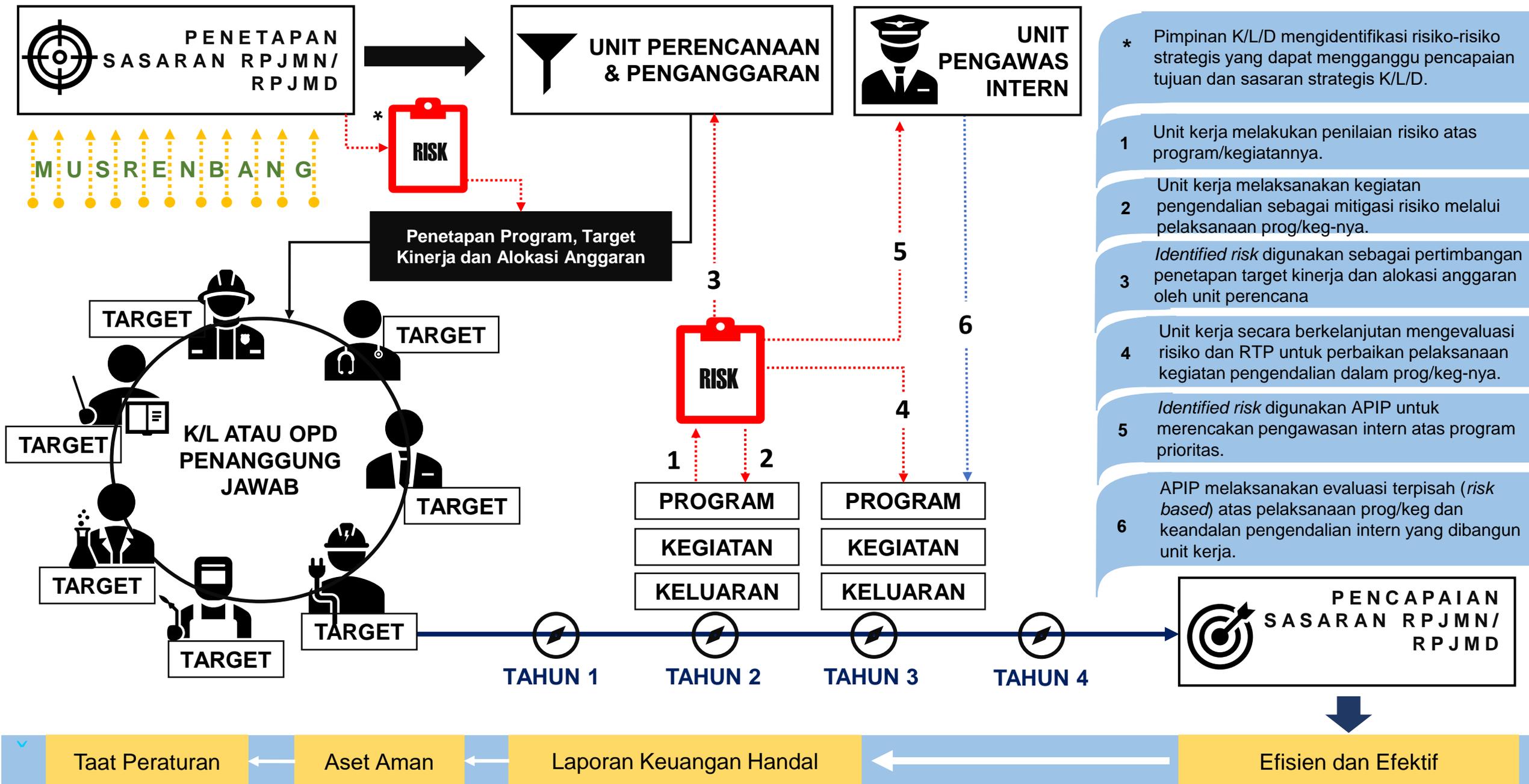


PEMBOBOTAN PENILAIAN



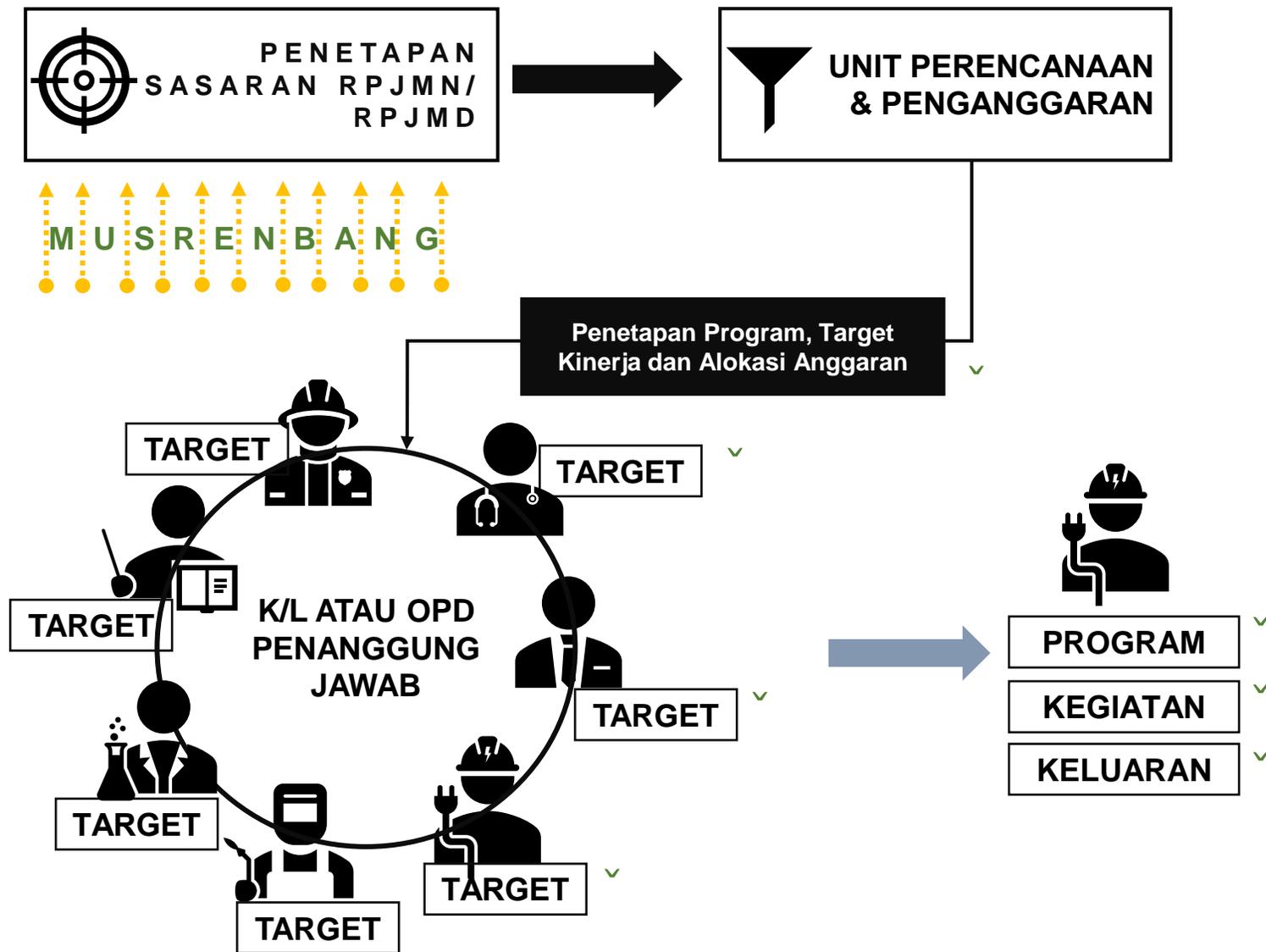
Komponen, Unsur, dan Subunsur	Bobot Unsur	Bobot K/L/D	Bobot Satker	Bobot Komponen
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP				
PENETAPAN TUJUAN				
Kualitas Sasaran Strategis	33.33%			
Perencanaan Terintegrasi	33.33%			
Kualitas Program dan Kegiatan	33.33%			
SUB JUMLAH PERENCANAAN	100.00%			
BOBOT PERENCANAAN				25.00%
STRUKTUR DAN PROSES				
Lingkungan Pengendalian	30.00%	60%	40%	
Penilaian Risiko	20.00%	60%	40%	
Kegiatan Pengendalian	25.00%	60%	40%	
Informasi dan Komunikasi	10.00%	60%	40%	
Pemantauan	15.00%	60%	40%	
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES	100.00%			
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES				50.00%
PENCAPAIAN TUJUAN SPIP				
Efektivitas dan Efisiensi				
Capaian Outcome	30.00%			
Capaian Output	20.00%			
Keandalan Laporan Keuangan				
Opini LK	20.00%			
Pengamanan atas Aset				
Keamanan Administrasi	6.00%			
Keamanan Fisik	6.00%			
Keamanan Hukum	3.00%			
Ketaatan pada Peraturan				
Jumlah Temuan BPK	10.00%			
Jumlah Temuan APIP	5.00%			
Kasus Korupsi				
SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN SPIP	100.00%			
BOBOT HASIL				25.00%
TOTAL BOBOT KOMPONEN				100.00%

Implementasi Manajemen Risiko dan SPIP dalam Manajemen Pemerintahan

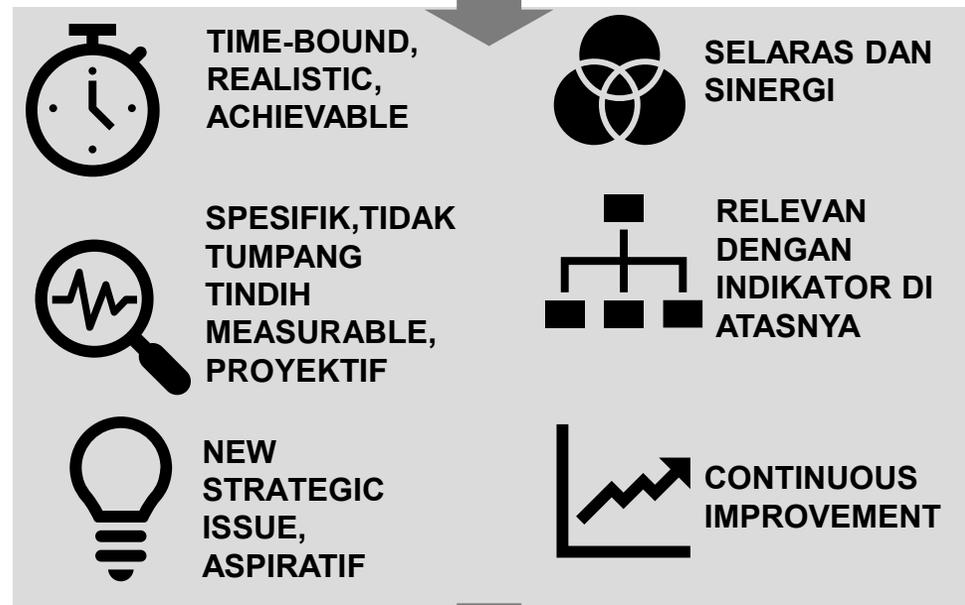


- * Pimpinan K/L/D mengidentifikasi risiko-risiko strategis yang dapat mengganggu pencapaian tujuan dan sasaran strategis K/L/D.
- 1 Unit kerja melakukan penilaian risiko atas program/kegiatannya.
- 2 Unit kerja melaksanakan kegiatan pengendalian sebagai mitigasi risiko melalui pelaksanaan prog/keg-nya.
- 3 *Identified risk* digunakan sebagai pertimbangan penetapan target kinerja dan alokasi anggaran oleh unit perencana
- 4 Unit kerja secara berkelanjutan mengevaluasi risiko dan RTP untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan pengendalian dalam prog/keg-nya.
- 5 *Identified risk* digunakan APIP untuk merencanakan pengawasan intern atas program prioritas.
- 6 APIP melaksanakan evaluasi terpisah (*risk based*) atas pelaksanaan prog/keg dan keandalan pengendalian intern yang dibangun unit kerja.

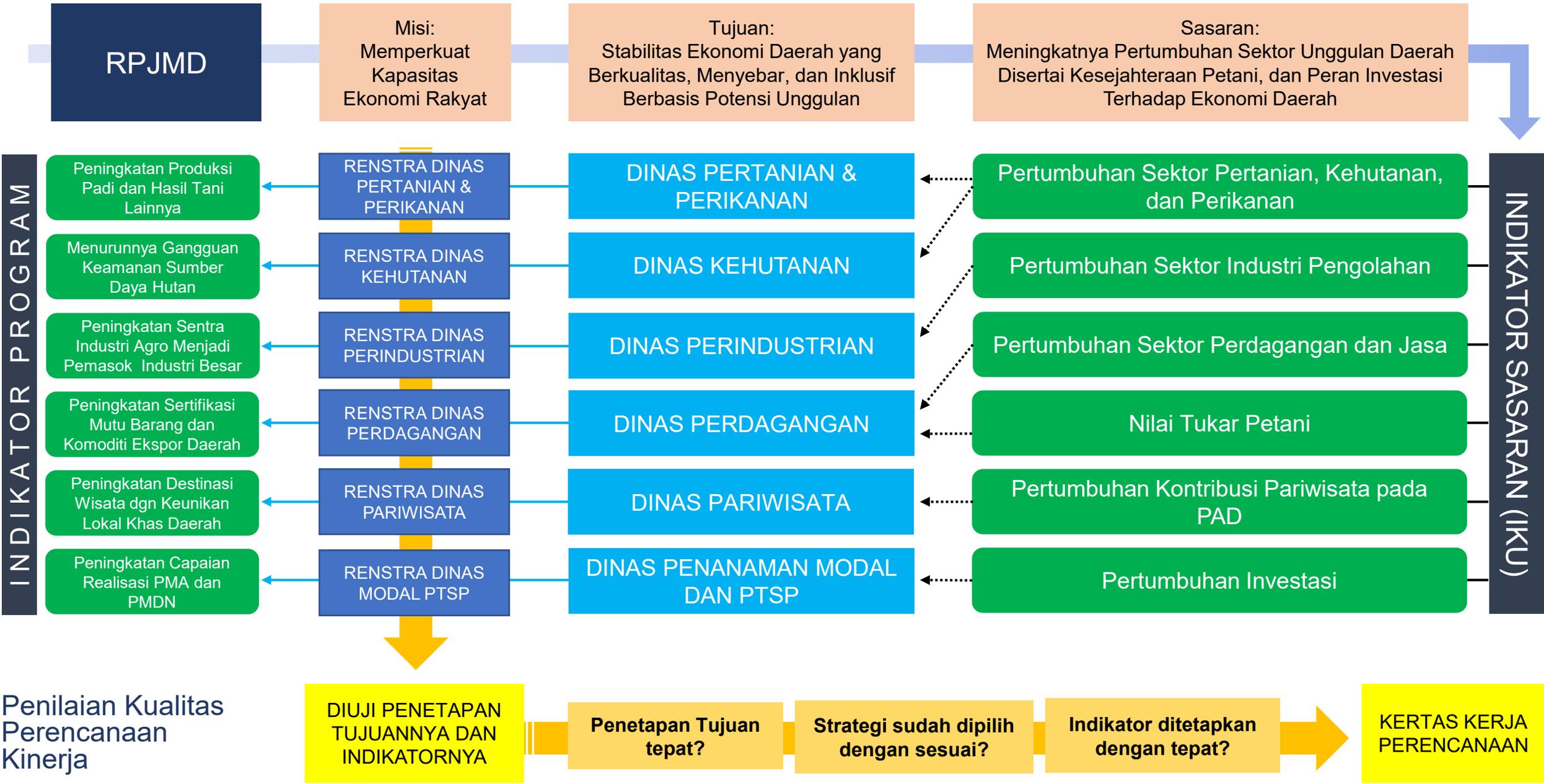
A. PENILAIAN KUALITAS PERENCANAAN KINERJA



- A. Kualitas Sasaran Strategis
 - 1. Sasaran Strategis K/L/D
 - 2. Sasaran Strategis Satker
- B. Perencanaan Terintegrasi
 - 1. Desain Perencanaan Terintegrasi
 - 2. Penerapan Perencanaan Terintegrasi
- C. Kualitas Program dan Kegiatan
 - 1. Kualitas Program
 - 2. Kualitas Kegiatan



PENETAPAN IKU SAMPEL, SATKER/OPD SAMPEL, DAN PROSES BISNIS YANG AKAN DIUJI (PENETAPAN KONTEKS)



B. PENILAIAN STRUKTUR DAN PROSES

DINAS PM DAN PTSP

DINAS PERINDUSTRIAN

DINAS PERDAGANGAN

DINAS PARIWISATA

DINAS KEHUTANAN

UJI DAHULU BAGAIMANA INSTANSI PEMERINTAH (IP) MEMBANGUN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

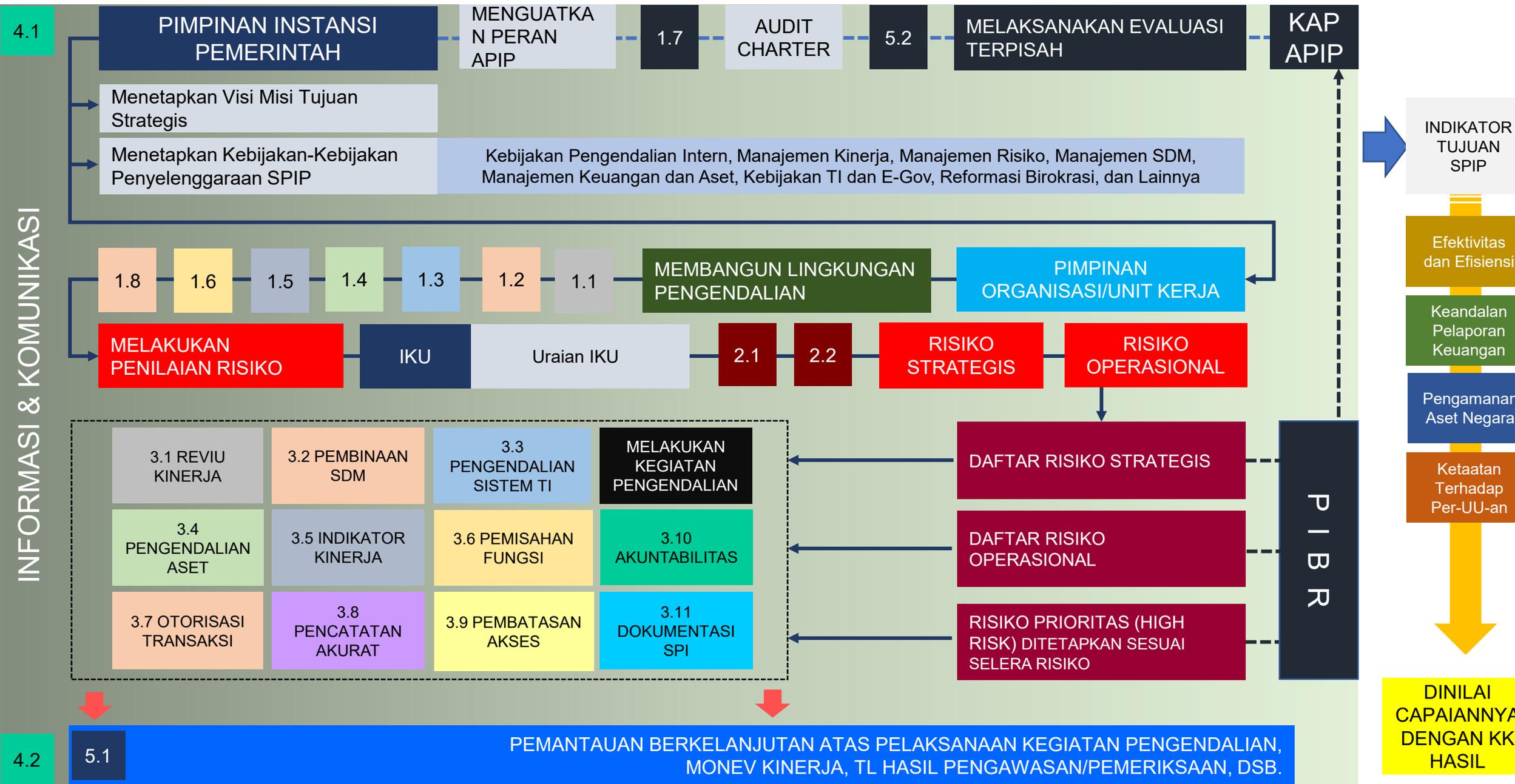
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP		INDIKATOR TUJUAN SPIP				KESIMPULAN
		Efektivitas dan Efisiensi	Keandalan Pelaporan Keuangan	Pengamanan Aset Negara	Ketaatan Terhadap Per-UU-an	
1.1	Pegawai menegakan integritas dan nilai etika dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi	▼	▼	▼	▼	▼
1.2	Tugas dan jabatan dalam organisasi dilaksanakan dan diisi oleh SDM yang kompeten	▼	▼	▼	▼	▼
1.3	Pimpinan organisasi mendukung penerapan pengendalian intern dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk meningkatkan kinerja	▼	▼	▼	▼	▼
1.4	Struktur organisasi dibentuk dalam rangka mendukung pelaksanaan probis dan masing-masing unit mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi	▼	▼	▼	▼	▼
1.5	Wewenang dan tanggung jawab diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai tingkatannya untuk mendukung efektivitas dan efisiensi	▼	▼	▼	▼	▼
1.6	Penerapan kebijakan manajemen dan praktik pembinaan SDM sehingga dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi	▼	▼	▼	▼	▼
1.8	Pimpinan organisasi menjalin hubungan kerja yang baik (kemitraan) dengan instansi lain terkait dengan upaya pencapaian tujuan organisasi	▼	▼	▼	▼	▼

LINGKUNGAN PENGENDALIAN DIBANGUN SEBAGAI PONDASI PELAKSANAAN KEGIATAN PENGENDALIAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN SPIP, MR, DAN PENCEGAHAN KORUPSI

Lanjut Slide Berikutnya



Pengujian Penyelenggaraan SPIP pada Instansi Pemerintah



CONTOH PENILAIAN STRUKTUR DAN PROSES

Subunsur 1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika

Parameter:
Pegawai menegakan integritas dan nilai etika dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi

Kriteria E:
Terdapat kebijakan penegakan integritas dan nilai etika untuk seluruh pegawai dalam organisasi

Kriteria D:
Kebijakan penegakan integritas dan nilai etika organisasi telah dipahami oleh seluruh pegawai

Kriteria C:
Penegakan integritas dan nilai etika telah dilaksanakan oleh pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam organisasi

Kriteria B:
Kebijakan dan implementasi organisasi telah dievaluasi untuk meningkatkan integritas dan nilai etika para pegawai

Kriteria A:
Penegakan integritas dan nilai etika telah diperbaiki secara berkelanjutan sehingga tercipta suasana kerja organisasi yang kondusif yang dapat mendorong kinerja para pegawai secara optimal

Langkah Pengujian:

Pengujian	Teknik	Efektivitas dan Efisiensi	Keandalan Pelaporan Keuangan	Pengamanan Aset Negara	Ketaatan Terhadap Per-UU-an
Kriteria E	Analisis Dokumen	Pasal 2 Perbup Nomor 13 Th 2018 tentang Budaya Kerja Organisasi Kab. Mipan: "Pimpinan memberikan keteladanan pelaksanaan kinerja melalui perwujudan kehadiran yang produktif, berada di ruangan dan taat jam kerja, serta mendorong etos kerja yang baik.	Pasal 56 Perbup Nomor 24 Th 2015 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Kab. Mipan: "Pengelola SAI tidak diperbolehkan memberikan akses kepada orang di luar sistem/tusi akuntansi, dan pimpinan unit disiplin dalam memonitor pelaksanaannya dengan baik, dan memberikan hukuman disiplin bagi yang melanggar.	Diktum Kelima Kep Bup Nomor 21 Th 2020 tentang Pejabat Pengelola BMD di Lingkungan Kab. Mipan: "Kepala Dinas/Badan, Kepala Unit, dan Pejabat pengguna kendaraan operasional dilarang menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi, dan/atau memarkir kendaraan dinas pada tempat yang beresiko merusak fisik kendaraan dan/atau merusak citra Instansi."	Pasal 5 Perbup Nomor 13 Th 2018 tentang Budaya Kerja Organisasi Kab. Mipan: "Pimpinan membangun kewaspadaan terhadap risiko tindak pidana korupsi melalui kampanye anti gratifikasi, himbuan rutin, pembangunan kanal pengaduan, pelaksanaan bintal dan/atau kegiatan sejenis, dan membangun budaya saling mengingatkan antar pegawai."

- Apabila KRITERIA E telah terpenuhi, lakukan penilaian pada kriteria di atasnya, yaitu KRITERIA D, demikian seterusnya
- Penilaian diberikan pada kriteria tertinggi yang dapat terpenuhi dan dengan menggunakan sistem *building block*

C. PENILAIAN PENCAPAIAN HASIL

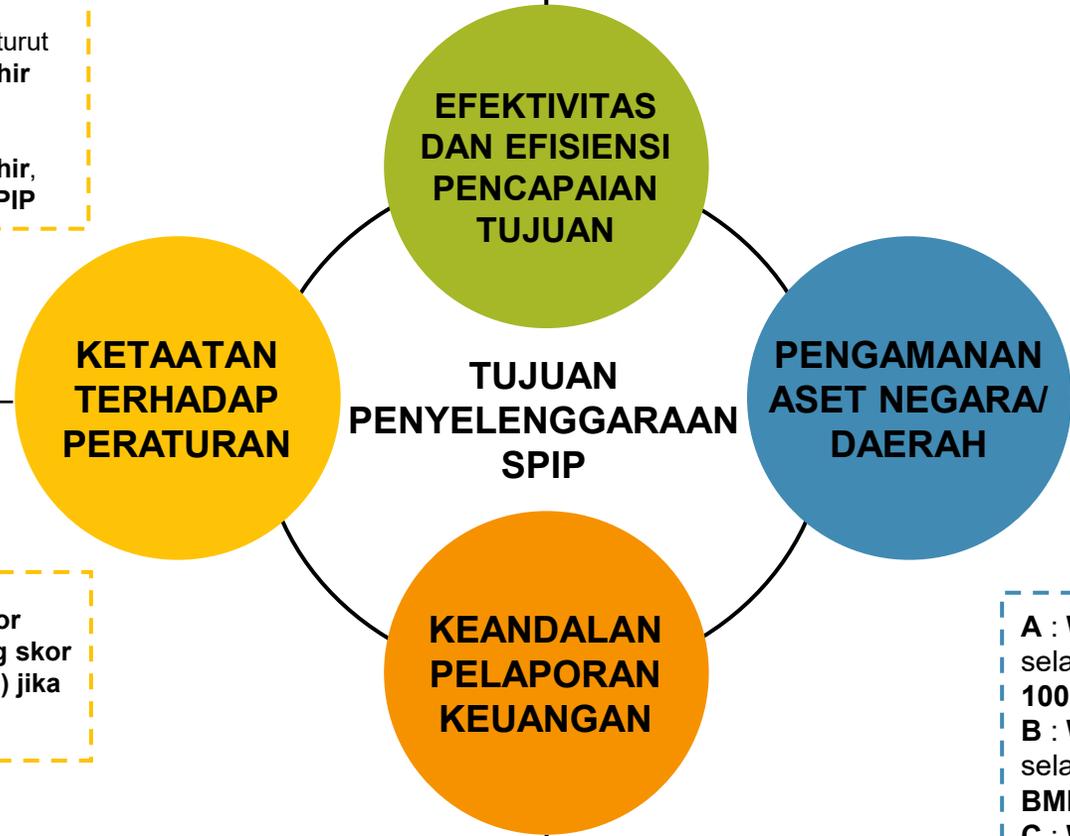
- A : >100%
- B : ≥90%-100%
- C : ≥70%-90%
- D : ≥50%-70%
- E : 0-50%

- Capaian *Outcome* (efektivitas pencapaian tujuan organisasi)
- Capaian *Output* (efisiensi pencapaian tujuan kegiatan)

- Keamanan Administrasi (kualitas penatausahaan BMN/D dari sisi administrasi)
- Keamanan Hukum (uoya melindungi BMN/D dari persengketaan, gugatan, dan peralihan kepemilikan yang tidak sah)

- Opini atas LK BPK (kewajaran penyajian LK)

- A : WTP min. 5x berturut, **tidak ada** catatan terkait aset, selama 5th tidak terdapat aset bermasalah hukum dan 100% BMN/D berfungsi baik dan aman
- B : WTP min. 3x berturut, **tidak ada** catatan terkait aset, selama 3th tidak ada aset bermasalah hukum dan 100% BMN/D berfungsi baik dan aman
- C : WTP min. 1x, **masih ada** catatan terkait aset, selama 2th **tidak ada** aset bermasalah hukum, 100% BMN/D berfungsi baik dan aman
- D : WDP/terdapat **catatan** terkait aset, **terdapat aset bermasalah** hukum namun **tidak mempengaruhi opini** BPK, 75-99% BMN/D berfungsi baik dan aman
- E : **Disclaimer/Tidak Wajar dan/terdapat catatan** terkait aset, **terdapat aset bermasalah** hukum yang **mempengaruhi opini** BPK, <75% BMN/D berfungsi baik dan aman



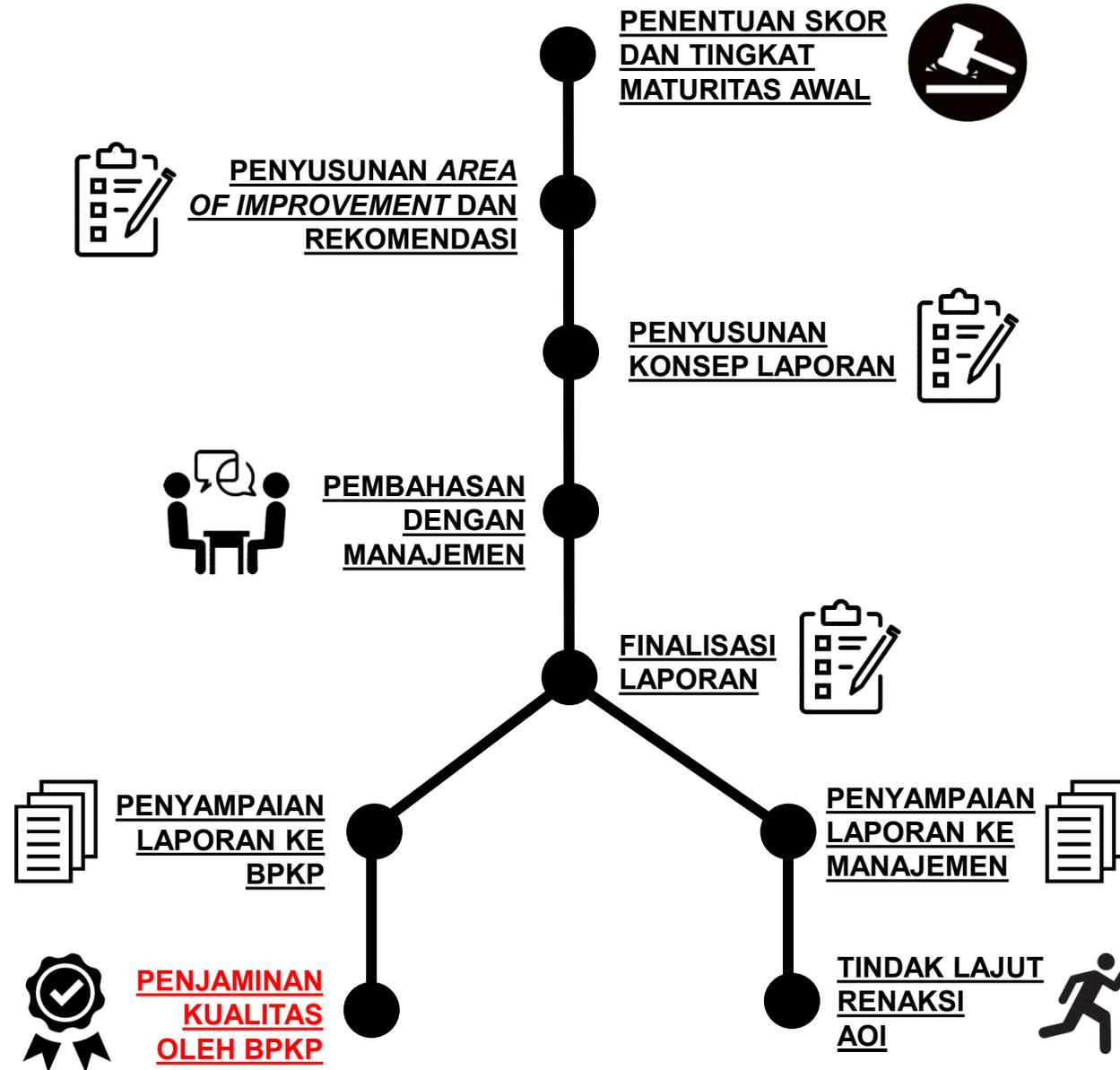
- A : jumlah temuan ketidakpatuhan BPK ≤5 selama 4th berturut dan **tidak mempengaruhi opini**, **tidak** terdapat temuan ketidakpatuhan signifikan dalam LHP APIP selama 4th berturut
- B : jumlah temuan ketidakpatuhan BPK ≤5 selama 3th berturut dan **tidak mempengaruhi opini**, **tidak** terdapat temuan ketidakpatuhan signifikan dalam LHP APIP selama 3th berturut
- C : jumlah temuan ketidakpatuhan BPK ≤5 selama 2th berturut dan **tidak mempengaruhi opini**, **tidak** terdapat temuan ketidakpatuhan signifikan dalam LHP APIP selama 2th berturut
- D : jumlah temuan ketidakpatuhan BPK ≤5 dalam TA terakhir dan **tidak mempengaruhi opini**, **terdapat temuan** ketidakpatuhan dalam LHP APIP selama 2th terakhir
- E : jumlah temuan ketidakpatuhan BPK >5 dalam TA terakhir, **terdapat temuan** ketidakpatuhan **signifikan** dalam LHP APIP

- Temuan Ketidakpatuhan dalam LHP BPK
- Temuan Ketidakpatuhan dalam LHP APIP
- Keterjadian Tipikor

Kejadian Tipikor menjadi pengurang skor keseluruhan (veto) jika terjadi

- A : WTP min. 5x berturut-turut tanpa temuan berulang
- B : WTP 3-4x berturut-turut tanpa temuan berulang
- C : WTP 1-2x berturut-turut, ada temuan berulang
- D : WDP/WTP Dengan Paragraf Penjelas
- E : Disclaimer/Tidak Wajar

3. TAHAP PELAPORAN DAN PEMANTAUAN



SLIDE BERIKUT



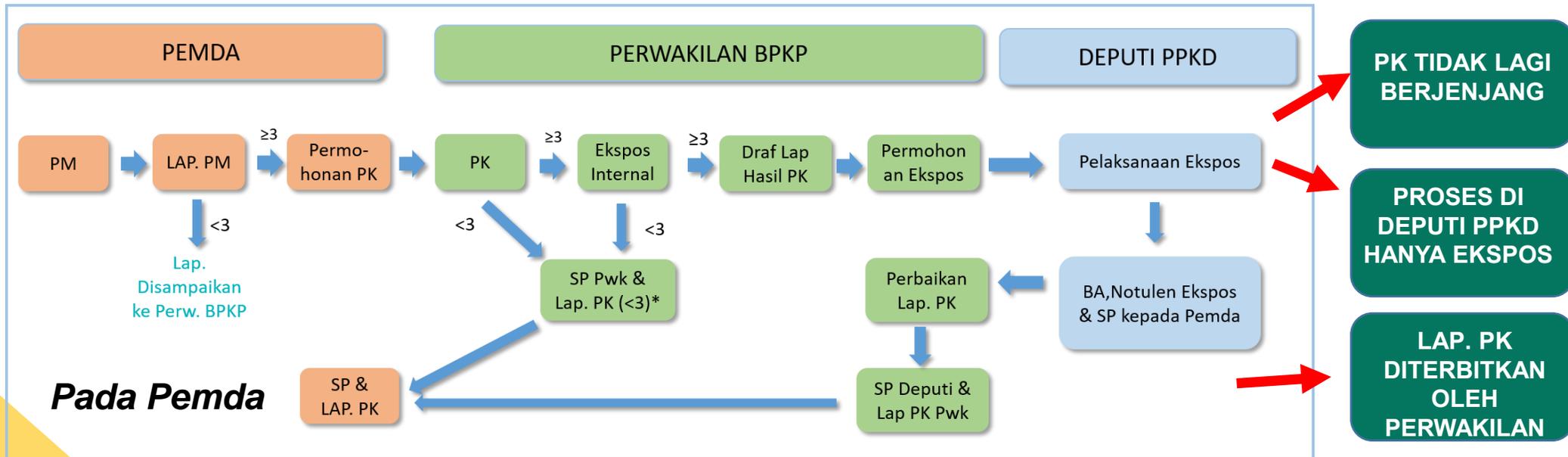
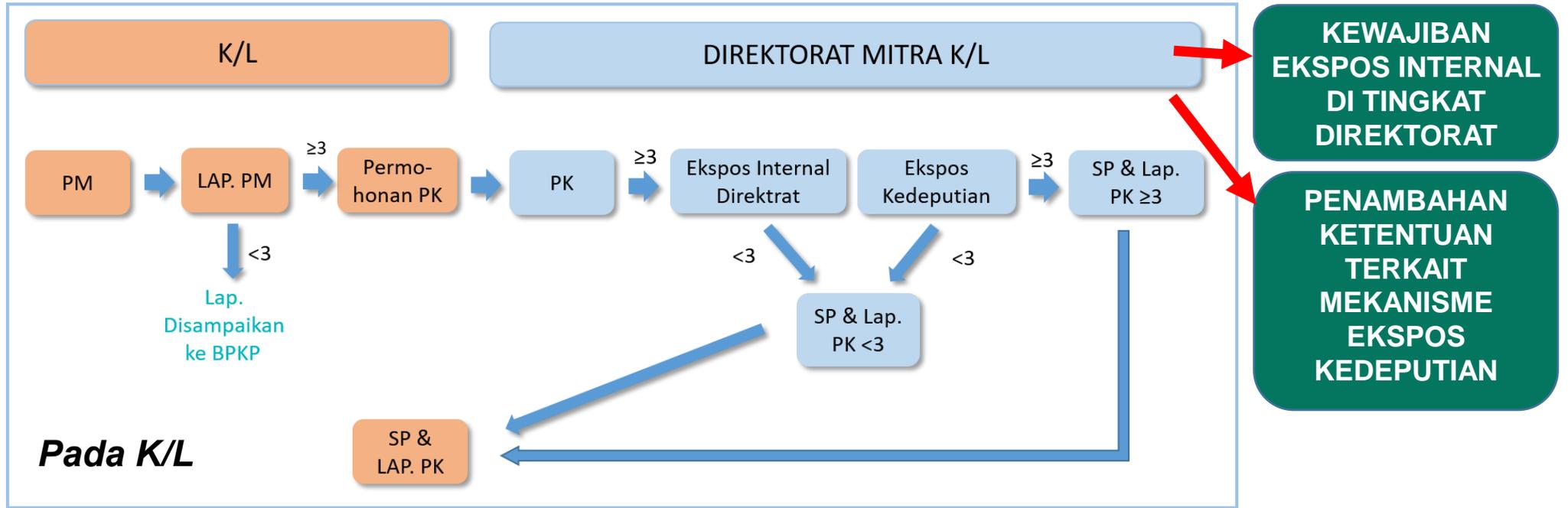


**PENJAMINAN KUALITAS
ATAS HASIL PENILAIAN
MANDIRI**

PERBANDINGAN PENJAMINAN KUALITAS SEBELUM DAN SESUDAH PEMBAHARUAN

HAL	LAMA	BARU
Periode Penjaminan Kualitas	Sesuai Permintaan	Serentak pada Bulan Juli – Agustus Setiap Tahun
Jumlah Hari Penugasan	Tidak ditentukan	Minimal 15 Hari Desk QA 20%, Penugasan Lapangan 60%, Pelaporan 20%
Tim Penjaminan Kualitas	Tidak ditentukan	Tim PK = bukan tim yang melaksanakan pembinaan pada K/L/D untuk menghindari moral hazard
Hasil PM yang dilakukan PK	Minimal Level 2	Minimal Level 3
Pelaksanaan PK untuk PM Pemda	Berjenjang	Tidak Berjenjang
Pelaksanaan Ekspos	Ekspos dilakukan di tingkat Kedeputan saja, Ekspos internal optional	Ekspos Internal Diwajibkan (tingkat internal Perwakilan/Direktorat) selanjutnya dilakukan Ekspos di tingkat Kedeputan
	Tim Panel Ekspos berasal dari Bidang/Direktorat/Kedeputan Terkait	Tim Panel Ekspos berasal dari Bidang/Direktorat/Kedeputan Terkait dan Investigasi
Laporan Hasil PK	Diterbitkan oleh Eselon 1	Diterbitkan oleh Eselon 2 PK K/L : Direktorat Terkait PK Pemda : Perwakilan BPKP

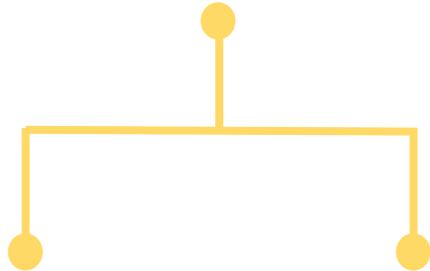
1. ALUR PENJAMINAN KUALITAS



2. TAHAPAN PENJAMINAN KUALITAS

A. TAHAP PERSIAPAN

1) PEMBENTUKAN TIM



Perwakilan BPKP

- Bidang yang menangani SPIP dan MR
- Bidang yang menangani kapabilitas APiP
- Bidang Investigasi

Kedeputan BPKP

- Direktorat Mitra K/L
- Direktorat dari Kedeputan Investigasi

2) PENETAPAN HARI DAN JADWAL

No.	Kegiatan	HP
1.	Desk QA	20%
	Pelaksanaan penjaminan kualitas berdasarkan data yang telah diterima (laporan hasil penilaian mandiri dan dokumen pendukung)	
	Penyusunan rencana/program kerja penjaminan kualitas di lokasi K/L/P	
2.	Penugasan di lokasi K/L/P	60%
	<i>Entry Meeting</i>	
	Kegiatan wawancara, observasi dan reviu dokumen	
	<i>Exit Meeting</i>	
3.	Penyusunan Laporan	20%

3) PENETAPAN SATUAN KERJA SAMPEL

50%

**DARI SATKER SAMPEL
PENILAIAN MANDIRI**

2. TAHAPAN PENJAMINAN KUALITAS

B. TAHAP PELAKSANAAN

PENJAMINAN KUALITAS

ATAS PROSES

No.	Tahapan	Bobot
1	Persiapan PM	20%
2	Pelaksanaan	60%
3	Pelaporan PM	20%



No.	Skor	Gradasi
1	$\geq 80\% \leq 100$	Sesuai
2	$\geq 56\% \leq 79$	Kurang Sesuai
3	$\leq 55\%$	Tidak Sesuai

ATAS HASIL

ANALISIS DAN PENGUJIAN SUBSTANSI SESUAI KRITERIA DAN PARAMETER



PENGUJIAN BUKTI melalui:
• Wawancara
• Reviu dokumen
• Observasi

C. TAHAP PELAPORAN

OUTPUT PENJAMINAN KUALITAS

BERITA ACARA

Ikhtisar hasil Penjaminan Kualitas

DRAFT LAPORAN HASIL

- Hasil Penjaminan Kualitas atas proses dan hasil
- Informasi kenaikan dan penurunan skor hasil Penjaminan Kualitas
- *Area of Improvement*
- Rekomendasi perbaikan



HASIL PK AKAN DIPUTUSKAN DENGAN EKSPON PANEL

2. TAHAPAN PENJAMINAN KUALITAS

D. EKSPOS PANEL

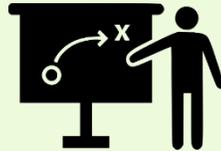
PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA

EKSPOS INTERNAL



Tim Panel:
Direkur terkait +
minimal 2 subdit

Proses:
Tim PK
memaparkan hasil
Tim panel menguji
hasil PK



EKSPOS TINGKAT KEDEPUTIAN



Tim Panel:
Ditunjuk Deputi
terkait dengan
anggota lintas
kedeputian
(kedeputian terkait
+ kedeputian
investigasi)

Proses:
Tim PK
memaparkan hasil
Tim panel menguji
hasil PK



SKOR, AOI, DAN REKOMENDASI PERBAIKAN

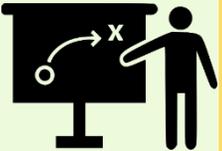
PADA PEMERINTAH DAERAH

EKSPOS INTERNAL



Tim Panel:
Kepala Perwakilan +
minimal 2 Korwas
(APD & Investigasi)

Proses:
Tim PK
memaparkan hasil
Tim panel menguji
hasil PK

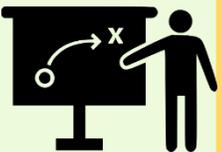


EKSPOS TINGKAT KEDEPUTIAN PPKD



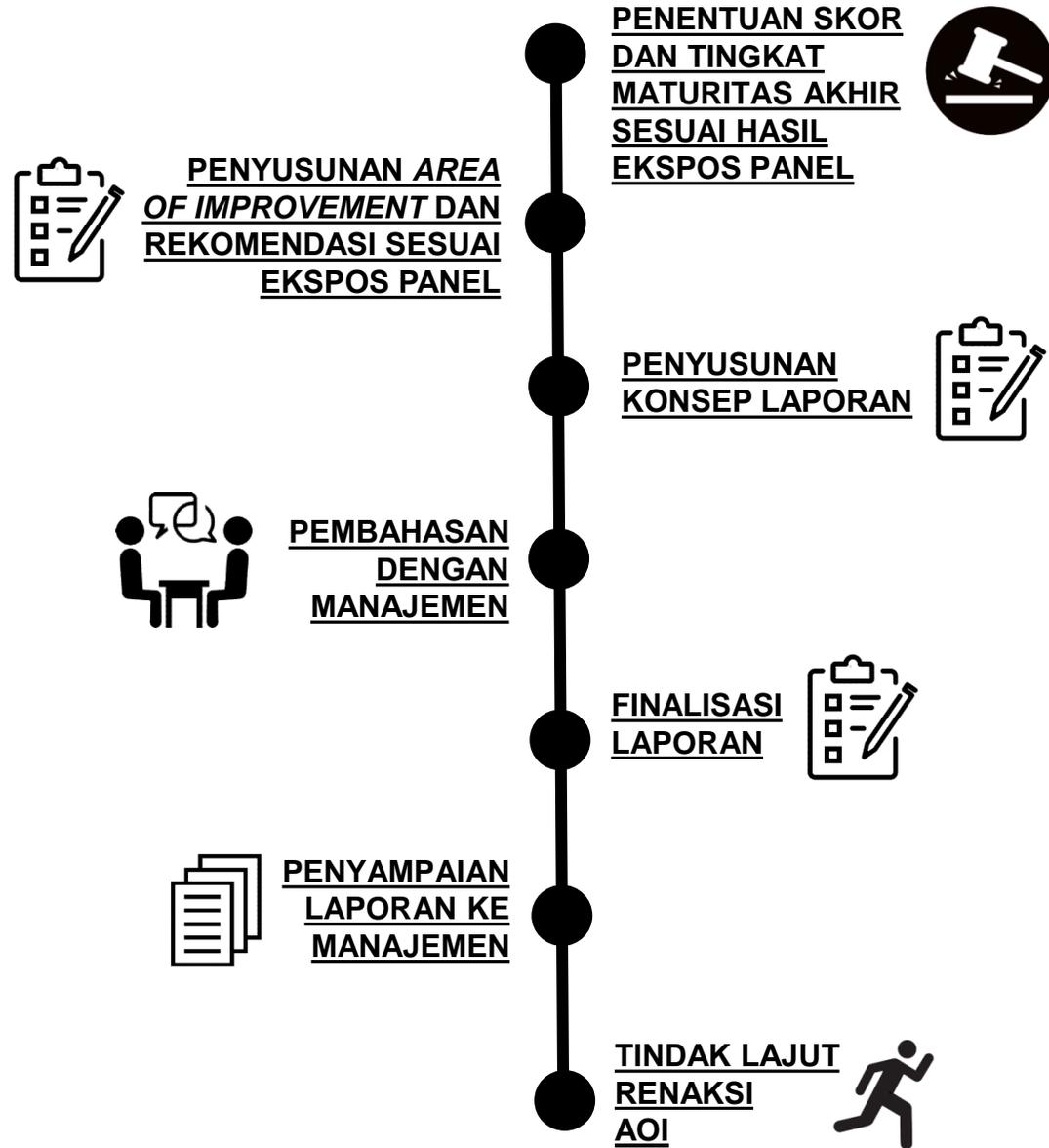
Tim Panel:
Ditunjuk Deputi
PPKD dengan
anggota lintas
kedeputian
(kedeputian PPKD
+ kedeputian
investigasi)

Proses:
Tim PK
memaparkan hasil
Tim panel menguji
hasil PK

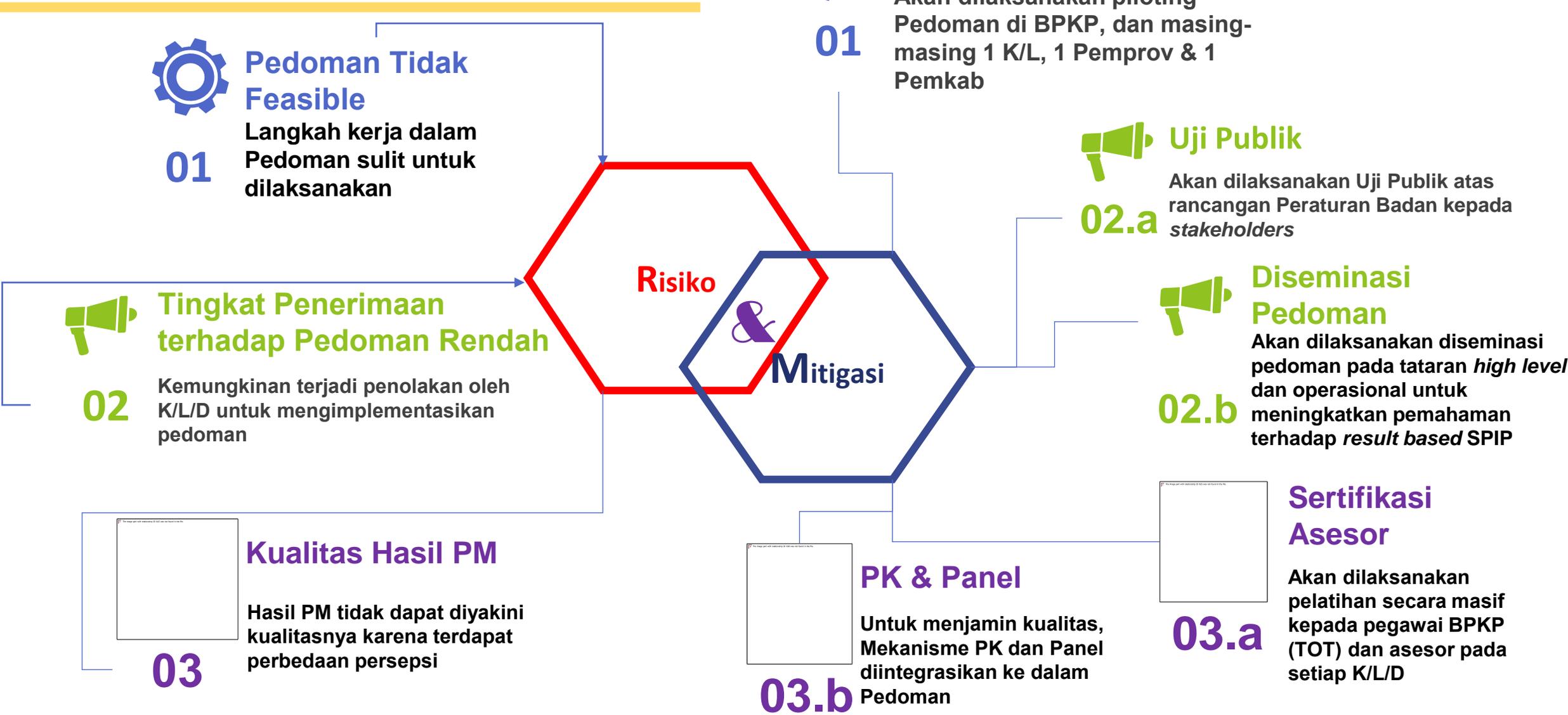


SKOR, AOI, DAN REKOMENDASI PERBAIKAN

3. TAHAP PELAPORAN DAN PEMANTAUAN



RISIKO DAN MITIGASI PENYUSUNAN DAN PENERAPAN PEDOMAN



RISIKO DAN MITIGASI PENYUSUNAN DAN PENERAPAN PEDOMAN



Terhambatnya Koordinasi

04

Keputusan untuk melibatkan berbagai jenis penilaian sebagai ukuran hasil serta berbagai pihak dalam proses penilaian berpotensi terhambat oleh koordinasi yang kurang memadai



Kolaborasi

04

Akan dilaksanakan Kolaborasi Internal dan Eksternal; mencakup Penyusunan PKPT, Pelaksanaan PM & PK, Pelaporan Hasil serta Pemantauan TL

05.a

Data Hasil Penilaian Tidak Terkelola dengan Baik

Data dan informasi terkait progres dan hasil penilaian tidak dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dengan segera

05.b

Keterbatasan Sumber Daya dan Waktu

Alur kerja dalam pedoman sulit untuk dikerjakan secara manual karena membutuhkan sumber daya dan waktu yang signifikan

06

Target Maturitas SPIP pada Renstra BPKP tidak tercapai

Pembaruan Pedoman menuju Result Based SPIP belum diperhitungkan ketika menentukan capaian target dalam Renstra BPKP

05

IT Support

Akan dilaksanakan Kolaborasi Internal dan Eksternal; mencakup Penyusunan PKPT, Pelaksanaan PM & PK, Pelaporan Hasil serta Pemantauan TL

06

Koordinasi dengan KL Regulator

Dukungan kebijakan dari Kementerian Keuangan, KemenPAN RB, Kemendagri, LAN, BPK



TERIMA KASIH

